

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Jumat, 08 Maret 2019



BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

| No | Media | Tanggal | News Title | Resume |
|----|-------------------------------|----------------------|--|--|
| 1 | Bisnis Indonesia (halaman 7) | Jumat, 08 Maret 2019 | Fokus Beralih ke Trans-Sumatra | Setelah menyelesaikan pembangunan jalan tol Trans-Jawa dari Merak hingga Pasuruan, pemerintah memfokuskan pengerjaan jalan tol Trans-Sumatra melalui penugasan kepada PT Utama Karya. |
| 2 | Bisnis Indonesia (halaman 9) | Jumat, 08 Maret 2019 | KEK Maloy Tetap Diresmikan | Permasalahan lahan di sekitar Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans-Kalimantan di Kutai Timur tidak menjadi kendala dalam peresmian pada 14 Maret 2019. Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Enoch Suharto Pranoto menyatakan, KEK Maloy Batuta Trans-Kalimantan (MBTK) bisa ikut diresmikan tanpa menunggu Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) disahkan. Selain itu, selama semua fasilitas sudah ada meskipun belum 100% selesai, KEK sudah bisa diresmikan. |
| 3 | Bisnis Indonesia (halaman 9) | Jumat, 08 Maret 2019 | Jawa Barat Siapkan Empat Pusat Budaya | Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membangun gedung pusat budaya di 27 kabupaten dan kota. Pada tahun ini baru empat daerah mendapat jatah. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan bahwa pihaknya akan membangun empat pusat kebudayaan pada tahun ini sebagai langkah awal. |
| 4 | Bisnis Indonesia (halaman 23) | Jumat, 08 Maret 2019 | Banyak Rumah Tak Berpenghunan di Daerah | Pemerintah daerah diharapkan bisa memprioritaskan masalah kepenghunan rumah bantuan dari pemerintah. Hal itu dinilai perlu dilakukan supaya bantuan perumahan yang telah dibangun tidak rusak dan dapat segera dihuni oleh masyarakat. |
| 5 | Bisnis Indonesia (halaman 23) | Jumat, 08 Maret 2019 | Hunian Impian dalam Genggaman | Sejak dulu, kini, dan nanti, memiliki rumah merupakan impian banyak orang. Namun, untuk mendapatkannya, harga dan lokasi rumah idaman menjadi pertimbangan utama. Tak jarang, mereka harus mendatangi rumah yang diinginkan meskipun baru sebatas melihat-lihat. Hal ini, tentu menghabiskan waktu dan biaya. Akan tetapi, dengan semakin berkembangnya teknologi seperti sekarang ini, upaya untuk memiliki rumah tak lagi rumit dan lama. |
| 6 | Bisnis Indonesia (halaman 23) | Jumat, 08 Maret 2019 | Berita Foto: Skema KPBU Rusunawa | Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PUPR Eko D. Heripoerwanto (kedua kiri), Direktur Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR Herry Trisaputra (kedua kanan), dan Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Armand Hermawan (tengah) mengunjungi PUPR Expo di Jakarta, Selasa (5/3). |
| 7 | Koran Tempo (halaman 24) | Jumat, 08 Maret 2019 | Proyek Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek Terancam Molor | Proyek jalan tol layang Jakarta-Cikampek atau Jakarta Cikampek (Japek) Elevated terancam tertunda dari target pengoperasian pada Juni mendatang, bertepatan dengan arus mudik Idul Fitri 2019. Sekertaris Perusahaan PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Agus Setiawan, mengatakan belum bisa memastikan kelayakan jalan tol layang tersebut untuk menjadi jalur fungsional arus mudik. Meskipun begitu, kata dia, manajemen Jasa Marga masih mengupayakan tenggat terpenuhi, meski menghadapi teknis pengerjaan yang kian rumit. |
| 8 | Media Indonesia (halaman 13) | Jumat, 08 Maret 2019 | Berita Foto | Progres Tol Trans-Sumatra di Deli Sedang |
| 9 | Media Indonesia (halaman 13) | Jumat, 08 Maret 2019 | Infrastruktur Ciptakan Pertumbuhan dengan Inflasi Rendah | Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Ari Kuncoro mengatakan pembangunan infrastruktur menciptakan pertumbuhan ekonomi dengan inflasi rendah. "Kami sebagai pengamat melihat dalam empat tahun terakhir terjadi kombinasi pertumbuhan ekonomi 5,1% atau 5,3% dengan inflasi di kisaran 3% karena pembangunan infrastruktur," katanya dalam Dialog Kupas Tuntas Tol Trans-Sumatra di |

| | | | | |
|-----------|---------------------------------|-------------------------|---|---|
| | | | | Medan, Sumatra Utara, Rabu (6/2). |
| 10 | Media Indonesia (halaman 13) | Jumat, 08 Maret 2019 | Kuota Ekspor Karet Indonesia 98 Ribu ton | Indonesia mendapat jatah ekspor karet sebanyak 98 ribu ton dari total 240 ribu ton kesepakatan ekspor karet tiga negara, yakni Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Hal itu dikemukakan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Pke Nurwan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (6/3) |
| 11 | Kompas (halaman 17) | Jumat, 08 Maret 2019 | Menteri PUPR Jajal Tol Sebelum Diresmikan | Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono meninjau Tol Bakauheni-Terbanggi Besar, Lampung, Kamis (7/3/2019). Hal itu untuk memastikan kesiapan tol yang akan diresmikan Presiden Joko Widodo, Jumat (8/3). Tiba di Gerbang Tol Natar sekitar pukul 15.30, Basuki langsung meninjau lokasi peresmian. Setelah meninjau Gerbang Tol Natar, Basuki melanjutkan peninjauan hingga Gerbang Tol Terbanggi Besar di Kabupaten Lampung Tengah. |

| | | | |
|--------|--|---------|----------------------|
| Judul | Fokus Beralih ke Trans-Sumatra | Tanggal | Jumat, 08 Maret 2019 |
| Media | Bisnis Indonesia (halaman 7) | | |
| Resume | Setelah menyelesaikan pembangunan jalan tol Trans-Jawa dari Merak hingga Pasuruan, pemerintah memfokuskan pengerjaan jalan tol Trans-Sumatra melalui penugasan kepada PT Hutama Karya. | | |

Setelah menyelesaikan pembangunan jalan tol Trans-Jawa dari Merak hingga Pasuruan, pemerintah memfokuskan pengerjaan jalan tol Trans-Sumatra melalui penugasan kepada PT Hutama Karya.

Sambil menuntaskan ruas terakhir proyek jalan tol Trans-Jawa, yakni Probolinggo—Banyuwangi dan tentunya ruas-ruas yang lain, satu per satu ruas Trans-Sumatra akan dibangun dan dioperasikan.

Sedikitnya, ada empat ruas tol Trans-Sumatra yang dalam waktu dekat secara bertahap diresmikan dan dioperasikan. Keempat ruas itu adalah ruas Bakauheni—Terbanggi Besar (140,93 kilometer), Medan—Binjai (Segmen Helvetia—Veteran 2,75 kilometer), Medan—Kualanamu—Tebing Tinggi seksi 7 (9,10 kilometer), dan Terbanggi Besar—Pematang Panggang—Kayu Agung (189,20 kilometer).

Secara keseluruhan ada 24 ruas jalan tol Trans-Sumatra dengan total panjang 2.765 kilometer.

"Dua di antaranya sudah mengantongi sertifikat laik operasi yaitu jalan tol Bakauheni—Terbanggi Besar dan Medan—Kualanamu—Tebing Tinggi seksi 7," kata Kepala Badan Pegatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit, belum lama ini.

Adapun, untuk jalan tol Medan—Binjai (Segmen Helvetia—Veteran) masih dalam proses pemberian sertifikat laik operasi di Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan jalan tol Terbanggi Besar—Pematang Panggang—Kayu Agung dalam proses penyelesaian konstruksi.

Secara keseluruhan ada 24 ruas jalan tol Trans-Sumatra dengan panjang keseluruhan 2.765 kilometer. Pembangunan jalan tol Trans-Sumatra yang diserahkan kepada PT Hutama Karya bakal menyerap investasi Rp476 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono optimistis ruas utama tol Trans-Sumatra sepanjang 2.000 kilometer (km) akan dapat tersambung pada 2024.

"Jika melihat capaian selama 4 tahun terakhir, tol Trans-Sumatra dari Bakauheni sampai Banda Aceh dengan panjang sekitar 2.000 kilometer akan tersambung secara bertahap hingga 2024," ujarnya.

PENDAPATAN PAJAK
Sementara itu, berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, pembangunan jalan tol Trans-Sumatra akan memberi pendapatan dari pajak sebesar Rp2.690 triliun hingga 2048, dengan pendapatan asli daerah (PAD) terbesar diterima Provinsi Sumatra Utara.

Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kermesku, Brahmantio Indijoso dalam laporannya Maret 2019 menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan daerah masing-masing berpotensi memperoleh manfaat dana (*value capture*) selama periode kajian (2018—2048) pada wilayah studi.

Berdasarkan hasil survei, wawancara, dan analisis tim konsultan, keberadaan jalan tol Trans-Sumatra akan meningkatkan penerimaan pajak dari kategori pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak lainnya bagi pemerintah pusat.

"Potensi penambahan penerimaan pajak selama periode proyeksi dampak [2018—2048] di wilayah studi sebesar minimal Rp2.690 triliun dengan rata-rata penambahan sebesar Rp86 triliun per tahun," katanya dalam laporan yang diperoleh *Bisnis*, Kamis (7/3).

Angka tersebut belum mencakup keseluruhan instrumen yang teridentifikasi, instrumen yang sudah ada, dan belum ada di Indonesia.

Keberadaan jalan tol tersebut, katanya, akan memberi tambahan bagi PAD di wilayah studi sebesar minimal Rp300,80 triliun (periode proyeksi dampak 2018—2048) dengan rata-rata PAD sebesar Rp9,70 triliun per tahun.

"Kabupaten/kota yang mendapatkan potensi tambahan PAD terbesar adalah Sumatra Utara yang diperkirakan mendapatkan 78% atau setara Rp233 triliun."

Pembangunan di Sumatra Utara yang berkembang pesat tentu berdampak terhadap kemacetan khususnya di jalan arteri di Medan, Ibu Kota Sumut.

Hal itu menjadi peluang bagi investor untuk membangun jalan tol. Meskipun pembangunannya berbiaya lebih mahal, jalan tol perkotaan memberi volume lalu lintas atau trafik yang padat sehingga setimpal dengan investasi yang dikeluarkan badan usaha.

Dalam perkembangan terbaru, PT Adhi Karya Tbk. (ADHI) dan PT

Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. (CMNP) menandatangani nota kesepahaman (*memorandum of understanding*) untuk mengusulkan pembangunan jalan tol dalam Kota Medan.

Direktur Keuangan ADHI Entas Asnawi mengatakan bahwa rencana pembangunan jalan tol dalam Kota Medan masih dalam tahap awal karena kedua pesertanya baru menajalin kesepahaman.

"Jadi, prosesnya belum terlalu jauh, baru tingkat MoU (*memorandum of understanding*). Ini akan ditindaklanjuti proses berikutnya, seperti pengusulan pemrakarsa dan seterusnya," katanya kepada *Bisnis*, Rabu (7/3).

Sementara itu, Direktur Utama ADHI Budi Harto menambahkan bahwa pesertanya bakal menyiapkan usulan atau prakarsa kepada BPJT.

Dia menyebutkan bahwa studi kelayakan masih disusun sehingga belum diketahui berapa investasi yang diperlukan untuk pembangunan jalan tol dalam Kota Medan.

Berdasarkan pemberitaan *Bisnis.com* sebelumnya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Sumatra Utara Ariel Sudarto Trinugroho mengatakan bahwa studi kelayakan jalan tol dalam Kota Medan akan dimulai tahun ini.

Menurutnya, pembebasan lahan juga akan dimulai meskipun sebagian besar jalan menggunakan median jalan yang sudah ada karena dibangun melayang.

"Mereka bikin FS [*feasibility study*] dulu. Baru masuk amdal [*analisis mengenai dampak lingkungan*], tetapi nanti bisa paralel," ujarnya.

Jalan tol dalam Kota Medan, katanya, akan dibangun sepanjang 30,97 kilometer, menghubungkan Helvetia dengan Amplas.

Pembangunan jalan tol itu terbagi menjadi tiga seksi, yakni seksi I Helvetia—Titikuning (14,28 km), seksi II Titikuning—Pulobrayan (12,44 km), dan seksi 3 Titikuning—Amplas (4,25 km).



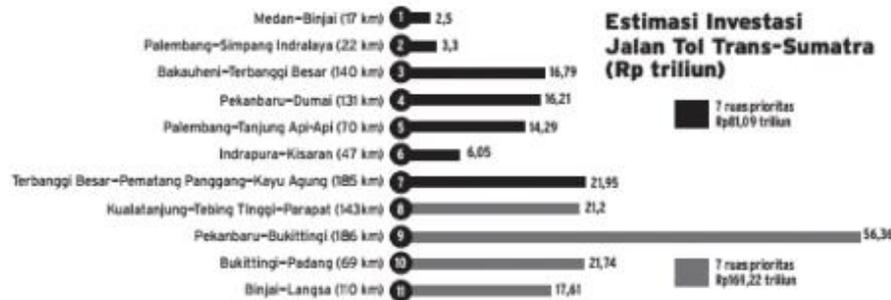
Konektivitas Tanah Andalas

Tak Ingin Sumatra tertinggal dari saudaranya Pulau Jawa, pemerintah mencanangkan pembangunan jalan tol Trans-Sumatra sejak 5 tahun lalu. Ini artinya adalah konektivitas dari ujung utara ke ujung selatan serta dari barat ke timur Andalas. Panjangnya 2.765 kilometer dan biaya pembangunannya diperkirakan hampir Rp476 triliun.

Melalui Peraturan Presiden No. 100/2014 yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden No. 117/2015, kemudian pemerintah memberi amanat kepada PT Hutama Karya untuk membangun dan mengembangkan jalan tol tersebut.

Sumber: PT Hutama Karya (Persero), diolah

BISNIS/RASTYO ENO



PEKERJA KONSTRUKSI



| | | | |
|--------|---|---------|----------------------|
| Judul | KEK Maloy Tetap Diresmikan | Tanggal | Jumat, 08 Maret 2019 |
| Media | Bisnis Indonesia (halaman 9) | | |
| Resume | Permasalahan lahan di sekitar Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans-Kalimantan di Kutai Timur tidak menjadi kendala dalam peresmian pada 14 Maret 2019. Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Enoch Suharto Pranoto menyatakan, KEK Maloy Batuta Trans-Kalimantan (MBTK) bisa ikut diresmikan tanpa menunggu Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) disahkan. Selain itu, selama semua fasilitas sudah ada meskipun belum 100% selesai, KEK sudah bisa diresmikan. | | |



Bisnis, SAMARINDA — Permasalahan lahan di sekitar Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans-Kalimantan di Kutai Timur tidak menjadi kendala dalam peresmian pada 14 Maret 2019.

Gloria FK Lawi
gloria.fransisca@bisnis.com

Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Enoch Suharto Pranoto menyatakan, KEK Maloy Batuta Trans-Kalimantan (MBTK) bisa ikut diresmikan tanpa menunggu Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) disahkan. Selain itu, selama semua fasilitas sudah ada meskipun belum 100% selesai, KEK sudah bisa diresmikan.

"Persyaratannya ada tiga untuk beroperasi, kesiapan infra-

► **KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) bisa ikut diresmikan tanpa menunggu Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) disahkan**

► **Dari delapan pemilik lahan di sekitar KEK MBTK, sudah lima yang dibayarkan. Saat ini masih tersisa tiga pemilik lahan yang belum dibebaskan lahannya.**

struktur dan fasilitas kawasan, lalu kelembagaan, dan perangkat pengendali," kata Enoch saat dihubungi *Bisnis*, Kamis (7/3).

Bisnis mencatat, saat ini DPRD Provinsi Kalimantan Timur masih menyusun Raperda untuk KEK MBTK sebagai kawasan khusus. Selain itu, Pemprov Kaltim telah menunjuk operator KEK Kaltim, yakni Perusda Melati Bhakti Satya (MBS). Beberapa hal yang menjadi perhatian khusus oleh Panitia Khusus (Pansus) Raperda KEK MBTK adalah terkait pembebasan lahan yang belum selesai dengan masyarakat setempat.

Menanggapi hal tersebut Enoch menyebut bahwa peresmian KEK tidak membutuhkan syarat Raperda. Alasannya, karena acuan KEK adalah *masterplan* serta Tata Tertib Kawasan. Adapun yang diusulkan dari pihak Dewan Nasional KEK adalah pengaturan ruang (ROTR) di luar KEK.

TIGA PEMILIK LAHAN

Bupati Kutai Timur Ismunandar menyatakan, dari delapan pemilik lahan di sekitar KEK

MBTK, sudah lima yang dibayarkan. Saat ini memang masih tersisa tiga pemilik lahan yang belum dibebaskan lahannya.

"Lahan yang belum dibebaskan itu terkait dengan fasilitas sarana air bersih. Sebenarnya bukan masalah besar seakan Maloy belum selesai, padahal lokasinya jauh di seberang," ujar Ismunandar menjelaskan lokasi 3 lahan penunjang sarana air bersih yang di luar kawasan Maloy.

Terkait dengan tiga lahan yang belum diselesaikan itu, Ismunandar menyatakan bahwa masih akan melakukan komunikasi untuk pembebasan. Dana yang digelontorkan juga bisa dari APBD Pemprov ataupun APBD Kabupaten.

Menurut Ismunandar, jika pemilik lahan setuju dengan harga pembebasan lahan dari Pemprov Kaltim sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), maka permasalahan ini bisa segera terselesaikan.

Ismunandar menyatakan bahwa semua persyaratan sudah terpenuhi.

Dia menyebutkan, misalnya sertifikasi lahan, pintu gerbang, fasilitas kantor, pelabuhan, dan juga *Online Single Submission* (OSS) untuk perizinan. Selain itu, di KEK Maloy juga telah dibangun BTS untuk memastikan jaringan telekomunikasi, khususnya jelang video conference peresmian KEK MBTK mendatang.

Ismunandar menjelaskan bahwa KEK MBTK ini akan

mengembangkan sektor non-migas, khususnya *renewable commodity*. Misalnya, kelapa sawit, singkong, dan jagung. Adapun fokus utama adalah untuk sektor pengolahan minyak sawit.

Ada beberapa insentif yang akan diberikan di KEK MBTK, untuk kegiatan utama pengolahan kelapa sawit dan pengolahan kayu, ada pengurangan PPh sebesar 20% sampai 100% selama 10 tahun-25 tahun untuk nilai investasi lebih dari Rp1 triliun.

Selain itu, ada pula pengurangan PPh sebesar 20% sampai 100% selama 5 tahun sampai 15 tahun untuk nilai investasi lebih dari Rp500 miliar.

Adapun, untuk kegiatan lainnya seperti logistik dan aneka industri ada *tax allowance* berupa pengurangan penghasilan netto sebesar 30% selama 6 tahun. Dikenakan pula PPh atas deviden sebesar 10%.

Beberapa insentif lainnya adalah Pasal 22 Impor tidak dipungut, PPN dan PPNBM tidak dipungut, ada pembebasan dan penanguhan bea masuk, kemudahan izin imigrasi dan pertanian, serta kemudahan izin ketenagakerjaan.

Menurutnya, sampai dengan 2025, KEK Maloy ditargetkan bisa mendulang investasi sampai Rp34,3 triliun dan meningkatkan PDRB Kutai Timur sampai Rp4,67 triliun per tahun.

"Tidak ada masalah, yang penting bisa memberikan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat," tuturnya. □

| | | | |
|--------|--|---------|----------------------|
| Judul | Jawa Barat Siapkan Empat Pusat Budaya | Tanggal | Jumat, 08 Maret 2019 |
| Media | Bisnis Indonesia (halaman 9) | | |
| Resume | Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membangun gedung pusat budaya di 27 kabupaten dan kota. Pada tahun ini baru empat daerah mendapat jatah. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan bahwa pihaknya akan membangun empat pusat kebudayaan pada tahun ini sebagai langkah awal. | | |

► PENGEMBANGAN WISATA

Jawa Barat Siapkan Empat Pusat Budaya

Bisnis, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membangun gedung pusat budaya di 27 kabupaten dan kota. Pada tahun ini baru empat daerah mendapat jatah.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan bahwa pihaknya akan membangun empat pusat kebudayaan pada tahun ini sebagai langkah awal. "Kabupaten/kota di zona priangan akan menjadi yang pertama, yaitu Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Subang," ungkapnya di Bandung, Selasa (6/3).

Menurut Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, pembangunan pusat-pusat kebudayaan ini sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap pelestarian budaya Sunda, sekaligus menjadi petuag terciptanya destinasi wisata baru.

Nantinya, berbagai khasanah seni dan budaya Sunda khas kabupaten/kota hingga taman untuk mengesang para seriman dan budayawan Sunda akan di hadir di setiap kabupaten/kota di Jabar.

"Pusat kebudayaan ini menandakan pemerintah provinsi sangat peduli dalam pelestarian budaya Sunda. Jadi, nanti wayang golek, pencak silat, kecapi suling, tari jaipongan, dan sebagainya," ujarnya.

Dalam APBD 2019, pihaknya menganggarkan, dana Rp5 miliar untuk setiap pusat kebudayaan yang akan dibangun. Namun, tidak menutup kemungkinan ada kerja sama penganggaran dari kabupaten/kota bersama provinsi.

"Pusat kebudayaan segitu dulu [Rp 5 miliar] nanti dilanjutkan di 2020 buat tambahannya, sambil menambah yang baru. Nanti kombinasi [anggaran kabupaten/kota dengan provinsi]," katanya.

Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jabar Agus Hanafiah mengatakan, anggaran Rp5 miliar-Rp7 miliar pada tahap pertama 2019 ini untuk keperluan fisik, mengingat lahan sudah disiapkan oleh daerah.

"Sampai dengan 2020 anggaranya berkisar sebesar itu," ujarnya.

Dana tersebut akan berupa bantuan

kesuagan kepada pemerintah daerah. Selain itu pihaknya akan memanfaatkan sumber pendanaan lain dalam membangun pusat kebudayaan tersebut.

"Untuk sekarang DED [detail engineering design] dibuat kita [Pemprov Jabar]. Dengan demikian, kabupaten/kota siap melaksanakan kegiatan. Proses DED juga melibatkan para seriman," ungkapnya.

Sementara untuk pengelolaan, pihaknya menyerahkan kepada pemerintah daerah dan petaku seni budaya di tiap daerah. Agus juga mengadain sejak awal selalu melibatkan pegiat seni di masing-masing daerah dalam pembangunan pusat budaya tersebut.

"Dari awal kita libatkan. Sehingga seriman, masyarakat lokal bisa memahami di situ. Termasuk siapa yang kelola. Tentu tidak boleh yang eksklusif kalau pengelolaan menjadi formal. Sehingga keterlibatan seluruh unsur pelaku seni," tuturnya.

Adapun, budayawan Tisna Sanjaya mengaku, mendukung pendirian gedung atau pusat kebudayaan di kabupaten/kota di Jawa Barat.

Menurutnya pusat kebudayaan sangat penting dan jelas dinantikan kehadirannya oleh masyarakat saat ini.

Hadinya pusat budaya ini diharapkan dapat menjadi pusat pengembangan, pelestarian, riset, hingga pendidikan budaya sekaligus. Artinya fungsi pusat kebudayaan yang hendak dibangun Provinsi Jawa Barat, harus total dan menyeluruh.

Apalagi, menurutnya, di setiap kota/kabupaten di Jawa Barat memiliki khasanah dan lekhasan budaya masing-masing. Dengan demikian, pusat kebudayaan ini bisa hadir sebagai *treatment* khusus dari pemerintah.

Bagi Tisna, kabar dibangunnya pusat kebudayaan di setiap kabupaten/kota menjadi 'angin segar' bagi para pelestari budaya khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya.

UNDANGAN PAMERAN

Pada perkembangan lain, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan undangan untuk mengikuti tiga pameran

tingkat internasional, di Turki, Rusia dan Spanyol. Namun, karena tahun ini anggarannya hanya untuk dua kegiatan, dipilih dua negara, Turki dan Rusia.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, Jateng memilih pameran di Turki dan Rusia karena dinilai sangat prospektif.

Di Moskwa, pameran akan digelar pada 1 Agustus 2019 yang berlangsung di World Trade Center atau Crowne Plaza Krasnopresnenskaya emb 12 Moskwa. Di Turki, pameran bertajuk 88th Izmir International Fair digelar pada 6-15 September 2019 yang akan menampilkan produk tekstil, dekorasi rumah dan kopi atau teh.

"Moskwa kita pilih karena mereka sangat tertarik terhadap produk-produk kita. Kita akan siapkan yang di Moskwa dulu. Per hari ini sudah harus melakukan korespondensi untuk menawarkan produk kita. Jadi *list of product*, harga jumlah, kapasitas, dibuat dan minta bantuan Dubes yang di Rusia untuk menawarkan ke sana," papar Ganjar Kamis (7/3). [06596289](#)

| | | | |
|--------|--|---------|----------------------|
| Judul | Banyak Rumah Tak Berpenghuni di Daerah | Tanggal | Jumat, 08 Maret 2019 |
| Media | Bisnis Indonesia (halaman 23) | | |
| Resume | Pemerintah daerah diharapkan bisa memprioritaskan masalah kepenghuniannya rumah bantuan dari pemerintah. Hal itu dinilai perlu dilakukan supaya bantuan perumahan yang telah dibangun tidak rusak dan dapat segera dihuni oleh masyarakat. | | |

► BANTUAN PEMERINTAH

Banyak Rumah Tak Berpenghuni di Daerah

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah daerah diharapkan bisa memprioritaskan masalah kepenghuniannya rumah bantuan dari pemerintah. Hal itu dinilai perlu dilakukan supaya bantuan perumahan yang telah dibangun tidak rusak dan dapat segera dihuni oleh masyarakat.

"Penda yang ingin mendapatkan bantuan perumahan dari pemerintah harusnya juga fokus pada kepenghuniannya rumah juga. Jangan sampai bantuan perumahan sudah dibangun, tetapi malah dibiarkan tidak berpenghuni," ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid melalui siaran pers, Kamis (7/3).

Menurut Khalawi, saat ini banyak kepala daerah yang mengajukan proposal pengajuan permohonan bantuan perumahan bagi masyarakat di daerahnya. Meskipun demikian, pihaknya tidak serta merta mengabulkan permohonan tersebut, tetapi perlu di cek kelengkapan administrasi dan kesiapan di lapangan.



Ke depan, kata Khalawi, Kementerian PUPR juga akan melakukan pemantauan dan pengevaluasian di lapangan mengenai bangunan perumahan yang selama ini telah dibangun dengan menggunakan dana APBN. Jika ternyata di lapangan ditemukan

ada bangunan perumahan yang telah dibangun belum berpenghuni, pihaknya akan menghubungi penda setempat untuk segera melakukan penghunian. "Masih banyak daerah lain yang membutuhkan bantuan perumahan ini. Jangan

sampai ada bangunan rumah yang tidak berpenghuni lagi. Kalau mau mengajukan proposal pembangunan rumah, bangunan yang lama harus dimanfaatkan terlebih dulu," katanya. Berdasarkan catatan Bisnis, Indonesia

Sejuta Rumah Kian Meriah

Pada 3 tahun pertama pelaksanaan program satu juta rumah oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat target tidak pernah tercapai. Baru 2018, target pembangunan sejuta rumah terlampau dengan pembangunan sebanyak 1,16 juta unit rumah. Dengan tercapainya target tersebut, jumlahnya pun ditambah. Tahun ini, pemerintah menetapkan angka 1,25 juta unit rumah sebagai target pembangunan.

Secara keseluruhan, dari 2015 hingga 2018 sudah terbangun sebanyak 3,94 juta unit rumah yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah maupun untuk masyarakat kalangan menengah. Target tahun ini, tampaknya bakal terlewat asalkan pemerintah segera membuat aturan baru yang menaikkan ambang batas gaji penerima bantuan subsidi rumah melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. *(Wahana Kawan)*

masih mengalami kekurangan pasokan rumah jutaan unit. Untuk memperkecil angka kekurangan pasokan, pemerintah telah mencanangkan program sejuta rumah.

Program satu juta rumah dirilis oleh Presiden Joko Widodo pada 29 April 2015. Realisasinya terus meningkat dari 699.770 unit pada 2015, menjadi 805.169 unit pada 2016, dan 904.758 unit pada 2017. Pada tahun lalu, jumlahnya menembus 1.132.621 unit. Dengan demikian, secara keseluruhan tercatat sudah dibangun 3.542.318 unit rumah.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Persatuan Perusahaan Real estat Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata mengungkapkan bahwa anggotanya berkontribusi 394.686 unit rumah atau sekitar 40% dari program tersebut, pada 2018.

Jumlah itu terdiri atas rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 214.686 unit dan rumah komersial bawah dengan harga Rp200 juta-Rp300 juta sebanyak 180.000 unit. *(Putri Saubilly)*

| | | | |
|--------|---|---------|----------------------|
| Judul | Hunian Impian dalam Genggaman | Tanggal | Jumat, 08 Maret 2019 |
| Media | Bisnis Indonesia (halaman 23) | | |
| Resume | Sejak dulu, kini, dan nanti, memiliki rumah merupakan impian banyak orang. Namun, untuk mendapatkannya, harga dan lokasi rumah idaman menjadi pertimbangan utama. Tak jarang, mereka harus mendatangi rumah yang diinginkan meskipun baru sebatas melihat-lihat. Hal ini, tentu menghabiskan waktu dan biaya. Akan tetapi, dengan semakin berkembangnya teknologi seperti sekarang ini, upaya untuk memiliki rumah tak lagi rumit dan lama. | | |

► RUMAH MASA KINI

Hunian Impian dalam Genggaman

Sejak dulu, kini, dan nanti, memiliki rumah merupakan impian banyak orang. Namun, untuk mendapatkannya, harga dan lokasi rumah idaman menjadi pertimbangan utama.

Mutiara Nabila
redaksi@bisnis.com

Tak jarang, mereka harus mendatangi rumah yang diinginkan meskipun baru sebatas melihat-lihat. Hal ini, tentu menghabiskan waktu dan biaya.

Akan tetapi, dengan semakin berkembangnya teknologi seperti sekarang ini, upaya untuk memiliki rumah tak lagi rumit dan lama.

Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Budi Hartono mengatakan bahwa saat ini untuk memiliki rumah, apalagi untuk milenial yang lebih senang menggunakan gawai untuk mengakses apa saja, bisa lebih mudah.

Persyaratan paling mudah untuk membeli rumah, terutama yang baru memiliki penghasilan adalah dengan mencari rumah subsidi dengan harga di bawah Rp150 juta. Calon pembeli rumah bisa mengajukan skema pembiayaan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

"FLPP ini bunganya rendah 5% fix sampai cicilan berakhir karena tujuannya untuk meringankan daya beli masyarakat dan dengan tenor hingga 20 tahun. Jadi, yang tadinya tidak mampu, jadi mampu mengangsur rumah meskipun penghasilan tidak sebetapa," kata Budi ketika ditemui *Bisnis*, Rabu (6/3).

Untuk mengajukan FLPP, pencari rumah hanya perlu memenuhi dokumen seperti kartu tanda penduduk, nomor pokok wajib pajak, dan keterangan penghasilan dengan gaji tidak lebih dari Rp4 juta.

Setelah itu, pencari rumah bisa memilih sendiri dan menghubungi pengembang dan melihat-lihat lokasinya. Setelah menemukan rumah yang cocok, pencari rumah bisa membayarkan booking fee kepada pengembang.

Setelah membayar ke pengembang dan melengkapi dokumen untuk pengajuan FLPP, kemudian dokumen tersebut dibawa ke bank dan tinggal mengajukan kredit pemilikan rumah (KPR) dan kalau lulus, rumah yang sudah dipilih bisa langsung dihuni.

"Setelah akad, bank akan menagihkan porsi

subsidi dari pemerintah lewat PPDPP. Sekarang itu sudah didukung oleh sistem e-FLPP. Jadi, sudah *paperless* sehingga prosesnya jadi sangat cepat dan pencairan ke bank itu bisa selesai dalam 3 hari," sambungnya.

Setelah dihuni, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tinggal mengangsur dan bagian-bagiannya pemerintah dibayarkan ke pemerintah, yang bagian-bagiannya bank diterima oleh bank.

Budi menyimpulkan bahwa untuk memiliki rumah tinggal ikuti lima langkah mudah, yaitu cek lokasi ke pengembang, lengkapi dokumen, dan akad KPR, kemudian tinggal tempati rumah.

PPDPP sudah ada sejak 2010, dan sampai Maret 2019 tercatat sudah menyalurkan dana subsidi bergulir hingga Rp37 triliun dan sudah 586.000 MBR lebih yang menikmati fasilitas tersebut.

Direktur Operasi PPDPP Nosta Tarigan menambahkan bahwa saat ini untuk pengurusan penyaluran FLPP sudah melalui sistem atau disebut e-FLPP.

"Hari ini kalau ada yang mengajukan ke bank, sistem kami akan langsung cek data ke dinas kependudukan dan catatan sipil. Calon pemilik rumah juga bisa memasukkan dokumen kapan saja, tetapi kalau tidak valid dokumennya akan dikembalikan. Masalah utamanya biasanya karena program ini khusus untuk pemilik rumah pertama," kata Nosta.

Adapun, prosesnya sangat aman dengan menggunakan sertifikasi langsung dengan berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang memang memiliki kemampuan untuk sertifikasi elektronik. "Karena dikeluarkan oleh badan negara, sangat aman dan *free of charge*."

Sistem ini juga dikembangkan untuk menjadi pen jembatan proses bisnis antara pemerintah dan bank. "Dengan sistem ini bisa langsung cek data FLPP dan SSB (subsidi selisih bunga). Jadi, pembeli tidak bisa ada yang mengajukan dua kali," jelas Nosta.

PPDPP juga terus memantau penyaluran FLPP sehingga pembeli rumah yang menggunakan fasilitas tersebut rumahnya harus dimanfaatkan dan harus dihuni sehingga dana pemerintah itu berguna.

"Tahun lalu kami survei 600 perumahan, target tahun ini sama, untuk memastikan bahwa rumah itu dimanfaatkan," ujarnya.

MELALUI PORTAL

Di sisi lain, Bank Tabungan Negara menyediakan



BANK/PTBSN

kan fasilitas yang bisa membuat masyarakat Indonesia lebih mudah dalam mencari dan membeli rumah selain menyediakan fasilitas KPR.

Head of Subsidized Mortgage Division Bank BTN Hirwandi Gafar menyebutkan bahwa masyarakat kini bisa mencari dan membeli rumah melalui portal btproperty.co.id yang menyediakan layanan mencari rumah baik yang subsidi dan nonsubsidi hingga melakukan pembayaran ke pengembang.

Selain merealisasikan KPR, BTN juga memberi dukungan kepada pengembang properti dari pembiayaannya, proses penguasaan lahannya, hingga pembangunan rumah.

Dengan portal lansiran BTN tersebut, masyarakat terutama milenial bisa semakin mudah juga untuk mengajukan KPR dan calon pembeli rumah juga bisa melihat-lihat rumah. Jika ada yang cocok, calon pembeli bisa langsung menghubungi pengembang dan membayar booking fee-nya lewat portal tersebut juga.

"Kalau rumah yang disenangi ada, langsung bayar booking fee bisa langsung di situ lewat portal tersebut. Selain itu disediakan juga kalkulatornya ada simulasi pembiayaannya," sambung Hirwandi.

Kemudian, kalau pencari rumah ingin melihat lokasi kerja ke lokasi perumahan itu, bisa melalui portal tersebut juga untuk melihat jarak dan waktu tempuhnya juga bisa. selanjutnya, waktu pengajuan KPR-nya pun bisa kapan saja, tidak

perlu ke kantor BTN.

Hirwandi mengatakan bahwa membeli rumah itu gampang, asal tidak terlalu konsumtif, semudah tidak mudah dirayu oleh penawaran kredit dari bank.

Selain BTN, di Indonesia sudah ada beberapa situs untuk mempermudah pencarian dan pembelian rumah seperti *Rumah123.com*, *SpaceStock*, dan *Lamudi.co.id*.

Hirwandi memprediksi ke depan, pembelian rumah secara daring bisa menjadi tren.

Adapun, tren pembelian rumah secara daring sudah menjadi tren di China. Situs terbesar, *Docu.com*, melaporkan terjadinya lonjakan transaksi di sektor properti sebesar 60% menjadi 5 miliar yuan (US\$740 juta) pada 2018 dan memprediksi peningkatan dias kali lipat tahun ini.

"Permintaan sangat kuat di kalangan kelas menengah yang memegang uang ekstra," kata Liu Yuan, kepala penelitian yang berbasis di Shanghai di broker properti Centaline Group.

"Pembelian menjadi lebih gampang dan sederhana dengan platform online," sambungnya, dikutip dari *Bloomberg*, Kamis (7/3).

Di antara pembeli lewat portal itu, sekitar setengah pembelian tanpa mengunjungi dulu properti yang dibeli, sedangkan sekitar 22% membeli hanya berdasarkan yang didapat di daring, tanpa panggilan telepon atau pertemuan tatap muka dengan agen sehingga semuanya ada di dalam genggaman. Gawai! 📱

Idaman Generasi Milenial

Generasi milenial sering dianggap sebagai kaum yang kurang meng-

dengan kegiatan *me time*.

Selain itu, generasi milenial membutuhkan tempat yang nyaman dan sederhana. Biasanya

| | | | |
|--------|---|---------|----------------------|
| Judul | Berita Foto: Skema KPBU Rusunawa | Tanggal | Jumat, 08 Maret 2019 |
| Media | Bisnis Indonesia (halaman 23) | | |
| Resume | Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PUPR Eko D. Heripoerwanto (kedua kiri), Direktur Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR Herry Trisaputra (kedua kanan), dan Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Armand Hermawan (tengah) mengunjungi PUPR Expo di Jakarta, Selasa (5/3). | | |

► SKEMA KPBU RUSUNAWA



Bisnis/Triawanda Tirta Aditya

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Eko D. Heripoerwanto (*kedua kiri*), Direktur Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra (*kedua kanan*), dan Direktur Utama PT Penjaminan

Infrastruktur Indonesia Armand Hermawan (*tengah*) mengunjungi PUPR Expo di Jakarta, Selasa (5/3). Kementerian PUPR mendahulukan skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) untuk Rusunawa, karena dapat menjadi dana tambahan dalam penyediaan infrastruktur dan meningkatkan jumlah hunian.

| | | | |
|--------|--|---------|----------------------|
| Judul | Proyek Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek Terancam Molor | Tanggal | Jumat, 08 Maret 2019 |
| Media | Koran Tempo (halaman 24) | | |
| Resume | Proyek jalan tol layang Jakarta-Cikampek atau Jakarta Cikampek (Japek) Elevated terancam tertunda dari target pengoperasian pada Juni mendatang, bertepatan dengan arus mudik Idul Fitri 2019. Sekertaris Perusahaan PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Agus Setiawan, mengatakan belum bisa memastikan kelayakan jalan tol layang tersebut untuk menjadi jalur fungsional arus mudik. Meskipun begitu, kata dia, manajemen Jasa Marga masih mengupayakan tenggat terpenuhi, meski menghadapi teknis pengerjaan yang kian rumit. | | |

Yohanes Paskalis Pae Dale
yohanes.paskalis@tempo.co.id

JAKARTA — Proyek jalan tol layang Jakarta-Cikampek atau Jakarta-Cikampek (Japek) Elevated terancam tertunda dari target pengoperasian pada Juni mendatang, bertepatan dengan arus mudik Idul Fitri 2019.

Sekretaris Perusahaan PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Agus Setiawan, mengatakan belum bisa memastikan kelayakan jalan tol layang tersebut untuk menjadi jalur fungsional arus mudik. Meski begitu, kata dia, manajemen Jasa Marga masih mengupayakan tenggat terpenuhi, meski menghadapi teknis pengerjaan yang kian rumit. "Jika tak bisa, kami akan merapikan tol Jakarta-Cikampek agar memudahkan pemudik," kata dia kepada *Tempo*, kemarin.

Jalan tol Japek Elevated dikerjakan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Jalan tol layang sepanjang 36,4 kilometer itu ditargetkan menjadi jalur fungsional pada masa mudik Idul Fitri mendatang. Pemerintah menganggap peran jalan tol ini penting untuk memecah kepadatan kendaraan roda empat yang keluar dari Jakarta.

Tingginya volume mobil ruas Jakarta-Cikampek kerap menjadi momok pemudik. Sepekan sebelum Idul Fitri 2018, misalnya, sebanyak 54 persen kendaraan dari Ibu Kota melintasi ruas tersebut. Sisanya terbagi dua menuju jalan tol Jakarta-Bogor-Ciawi, dan jalan tol Jakarta-Tangerang.

Awalnya, Jasa Marga mengajukan satu jalur berisi dua lajur untuk dipakai secara fungsional. Masing-masing lajur selebar 3,6 meter, belum dihitung dengan bahu jalan selebar



Pembangunan jalan tol layang Jakarta-Cikampek II di kawasan Sersan Marjuki, Bekasi, Jawa Barat, Senin lalu.

Proyek Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek Terancam Molor

Ada kemungkinan tidak bisa beroperasi untuk arus mudik Idul Fitri 2019.

2,5 meter. Pada kondisi operasional bertarif, volume kendaraan yang akan masuk tol layang itu mencapai 2.000-2.300 mobil per jam.

Menurut Agus, waktu pengerjaan proyek terbatas, hanya saat waktu khusus pukul 10.00 malam hingga 05.00 pagi. "Window time tak masalah, tapi tol ini dibangun di atas lalu lintas padat. Belum termasuk tantangan distribusi materialnya." Kendati begitu, Agus mengatakan, keputusan

pengoperasiannya akan diambil dalam beberapa bulan. "Idealnya pada H-14 masa angkutan mudik, awal Mei sudah ada keputusan," tutur dia.

Direktur Utama PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JJC), Djoko Dwi-jono, mengatakan pengerjaan proyek senilai Rp 16,3 triliun itu baru mencapai 71 persen. Saat ini, hanya tersisa pemasangan 600 balok girder ke atas tiang penyangga, dari kebutuhan total 2.400 balok. "Dengan

Profil Jalan Tol Jakarta-Cikampek II (Japek Elevated)

Panjang:
36,40 km

Nilai investasi:
Rp 16,3 triliun

Kontraktor:
PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Pengelola:
PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek



Awal pengerjaan:
Maret 2017

Target fungsional:
Juni 2019

Target beroperasi:
sebelum akhir 2019

NASKAH: YOHANES PASKALIS PAE DALE

sisa 29 persen, sangat tergantung kemampuan kontraktor untuk mengalokasikan sumber dayanya," kata dia.

Kontraktor bergerak di ruang terbatas, hanya 8-10 meter di sisi tengah jalan. Waskita Karya memakai teknologi *sosrobahu* atau engsel putar, untuk mempercepat pengecoran di tiang penyangga. "Jadi, soal fungsional itu, masih kami uraikan permasalahan yang ada, semoga bisa dilalui," kata Djoko.

Pengamat transportasi dari Universitas Katholik Soegijapranata, Djoko Seti-jowarno, menilai jalan tol layang tersebut tak mungkin layak difungsikan menjelang Idul Fitri tahun ini. Sebab, kata dia, hingga bulan ini konstruksinya masih di bawah 70 persen. "Mudik kurang dari 90 hari lagi," tutur dia. "Dengan asumsi kemajuan tiap pekan 1 persen, dalam sebulan hanya 4 persen. Masih perlu delapan bulan."

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pun mengakui pengerjaan proyek masih lambat. Meski sempat meredam benturan waktu antara pembangunan tol layang dan dua proyek lain, yaitu kereta cepat Jakarta-Bandung dan kereta rel ringan, dia mengakui proses konstruksi Japek Elevated masih terhambat kemacetan.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Danang Parikesit, mengatakan lembaganya belum memberi keputusan resmi mengenai penggunaan jalan tol Japek Elevated untuk arus mudik Idul Fitri tahun ini. "Ada komite keselamatan jembatan yang akan merekomendasikan apakah bisa diooperasikan saat Lebaran atau tidak." ● EGI ADYATAMA

| | | | |
|--------|--|---------|----------------------|
| Judul | Berita Foto | Tanggal | Jumat, 08 Maret 2019 |
| Media | Media Indonesia (halaman 13) | | |
| Resume | Progres Tol Trans-Sumatra di Deli Sedang | | |



PROGRES TOL TRANS-SUMATRA DI DELI SERDANG: Pekerja menyelesaikan konstruksi proyek pembangunan Tol Medan-Binjai seksi I di Deli Serdang, Sumatra Utara, Rabu (6/3). Pembangunan Tol Medan-Binjai seksi I ini merupakan bagian dari proyek Tol Trans-Sumatra sepanjang 2.700 km yang ditargetkan rampung di 2024. Saat ini, PT Hutama Karya (persero) (HK) selaku pelaksana dan operator tol sudah merampungkan 180 km, termasuk 140 km Bakauheni- Terbanggi Besar, Lampung, yang rencananya diresmikan Presiden Joko Widodo pada hari ini.

REUTERS/AGENCE FRANCE PRES

| | | | |
|--------|--|---------|----------------------|
| Judul | Infrastruktur Ciptakan Pertumbuhan dengan Inflasi Rendah | Tanggal | Jumat, 08 Maret 2019 |
| Media | Media Indonesia (halaman 13) | | |
| Resume | Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Ari Kuncoro mengatakan pembangunan infrastruktur menciptakan pertumbuhan ekonomi dengan inflasi rendah. "Kami sebagai pengamat melihat dalam empat tahun terakhir terjadi kombinasi pertumbuhan ekonomi 5,1% atau 5,3% dengan inflasi di kisaran 3% karena pembangunan infrastruktur," katanya dalam Dialog Kupas Tuntas Tol Trans-Sumatra di Medan, Sumatera Utara, Rabu (6/2). | | |

Infrastruktur Ciptakan Pertumbuhan dengan Inflasi Rendah

Presiden Jokowi meresmikan salah satu ruas Tol Trans-Sumatra, yakni Bakauheni-Terbanggi Besar, hari ini.

YOSEPH PENCAWAN
yoseph_pencawan@mediaindonesia.com

DEKAN Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Ari Kuncoro mengatakan pembangunan infrastruktur menciptakan pertumbuhan ekonomi dengan inflasi rendah.

"Kami sebagai pengamat melihat dalam empat tahun terakhir terjadi kombinasi pertumbuhan ekonomi 5,1% atau 5,3% dengan

inflasi di kisaran 3% karena pembangunan infrastruktur," katanya dalam Dialog Kupas Tuntas Tol Trans-Sumatra di Medan, Sumatera Utara, Rabu (6/2).

Ari setuju dengan langkah pemerintah menggenjot pembangunan infrastruktur. "Jadi sudah benar bangun jalan tol dulu, pasar akan mengikuti," ucapnya.

Lebih jauh dia menilai selain menghasilkan pertumbuhan dengan inflasi rendah, infrastruktur menyebabkan kesenjangan ekonomi dan kemiskinan turun.

"Kombinasi inflasi rendah, kemiskinan turun dan koefisien Gini turun, sesuatu yang luar biasa. Ini *infrastructurenomics*," pungkasnya.

Dalam kesempatan sama, Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Indonesia (KEIN) Arif Budimanta mengatakan pemba-

ngunan infrastruktur sangat penting. "Pembangunan infrastruktur memiliki nilai geoekonomi bagi Indonesia," ujarnya.

Arif menjelaskan pada 2025 Indonesia harus siap dengan program konektivitas ASEAN. Proyek Tol Trans-Sumatra sepanjang 2.700 kilometer lebih bisa menjadi bagian dari konektivitas tersebut.

"Sumatra adalah wilayah terdekat dengan Singapura. Dari Malaysia bisa sampai ke Eropa melalui jalan darat. Kita nanti bisa mengeksport komoditas Sumatra ke Asia dan Eropa," kata Arif.

Belum lagi, lanjut Arif, proyek *One Belt One Road* Tiongkok. "*One Belt One Road* memang bisa jadi ancaman, tetapi ada peluang di sana," ucap Arif.

Inisiatif Satu Sabuk dan Satu Jalan adalah strategi pembangunan yang diusulkan pemimpin tertinggi

Tiongkok Xi Jinping yang berfokus pada konektivitas dan kerja sama di antara negara-negara Eurasia, terutama Republik Rakyat Tiongkok.

Arif menambahkan pembangunan Tol Trans-Sumatra ini dalam konteks geoekonomi sudah lama ditunggu. "Tinggal keberanian dan langkah cepat."

Tol Trans-Sumatra

Terkait dengan Tol Trans-Sumatra, Direktur Utama Utama Karya Bintang Perbowo mengatakan pihaknya mendapat penugasan membangun 2.700 kilometer Tol Trans-Sumatra dalam 24 ruas. "Pembangunannya ditargetkan selesai 2023," jelasnya.

Sebanyak enam ruas tol sepanjang 485 km ditargetkan rampung pada 2019, yaitu ruas Medan-Binjai, Palembang-Indralaya, Bakauheni-

Terbanggi Besar, Pekanbaru-Dumai, Terbanggi Besar-Pematang Panggang, Pematang Panggang-Kayu Agung. "Ruas Palembang-Indralaya sudah beroperasi penuh di 2018. Insya Allah Presiden Jokowi meresmikan ruas Bakauheni-Terbanggi Besar pada 8 Maret (hari ini)," tukas Bintang.

Informasi dari Humas Provinsi Lampung menyatakan rencananya Presiden Jokowi meresmikan JTTS ruas Bakauheni-Terbanggi Besar di gerbang tol Natar, Lampung Selatan. "Pembangunan JTTS ruas Bakauheni-Terbanggi Besar selesai dan siap dioperasikan. Untuk itu, saya memastikan langsung berbagai persiapan terkait peresmian JTTS ini," ujar Gubernur Lampung M Ridho Ficardo seusai meninjau kesiapan peresmian JTTS Bakauheni-Terbanggi Besar, Rabu (6/3). (Eva/E-2)

| | | | |
|--------|---|---------|----------------------|
| Judul | Kuota Ekspor Karet Indonesia 98 Ribu ton | Tanggal | Jumat, 08 Maret 2019 |
| Media | Media Indonesia (halaman 13) | | |
| Resume | Indonesia mendapat jatah ekspor karet sebanyak 98 ribu ton dari total 240 ribu ton kesepakatan ekspor karet tiga negara, yakni Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Hal itu dikemukakan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Pke Nurwan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (6/3) | | |

Kuota Ekspor Karet Indonesia 98 Ribu ton

INDONESIA mendapat jatah ekspor karet sebanyak 98 ribu ton dari total 240 ribu ton kesepakatan ekspor karet tiga negara, yakni Indonesia, Malaysia, dan Thailand.

Hal itu dikemukakan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (6/3).

"Intinya sudah diputuskan, kalau tidak salah ialah 240 ribu ton, di mana (pembatasan ekspor karet) Indonesia 98 ribu ton," kata Oke.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemberlakuan pembatasan tersebut masih akan dibahas lebih lanjut karena Thailand meminta agar mulai diberlakukan setelah pemilu di negara itu selesai.

"Thailand minta berlakunya setelah kabinet barunya karena mau pemilu 24 Maret," jelasnya.

Untuk diketahui, pengaturan jumlah ekspor karet alam merupakan satu dari tiga kebijakan yang diputuskan dalam pertemuan khusus International Tripartite Rubber Council (ITRC) yang diinisiasi tiga negara produsen karet, yakni Indonesia, Malaysia, dan Thailand.

Adapun untuk mendongkrak harga karet, pemerintah berencana meningkatkan penggunaannya di dalam negeri. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya akan menyerap karet untuk dimanfaatkan sebagai bahan campuran aspal untuk jalan sepanjang 65,8 kilometer tahun ini.

Volume karet yang terserap dalam campuran aspal tersebut sebesar 2.542,2 ton. "Kalau yang program kami cuma 65 km, menyerap karet untuk 2.500 ton," kata Basuki se usai rapat koordinasi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta.

Menteri Basuki mengatakan karet yang digunakan untuk campuran aspal bukan lah karet mentah, melainkan karet remah atau *crumb rubber*. Nantinya, kata dia, 7% dari volume aspal akan disubstitusi oleh *crump rubber*, dan *crumb rubber* yang terserap per kilomernya sebanyak 3 ton. (Nur/E-1)

| | | | |
|--------|---|---------|----------------------|
| Judul | Menteri PUPR Jajal Tol Sebelum Diresmikan | Tanggal | Jumat, 08 Maret 2019 |
| Media | Kompas (halaman 17) | | |
| Resume | Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono meninjau Tol Bakauheni-Terbanggi Besar, Lampung, Kamis (7/3/2019). Hal itu untuk memastikan kesiapan tol yang akan diresmikan Presiden Joko Widodo, Jumat (8/3). Tiba di Gerbang Tol Natar sekitar pukul 15.30, Basuki langsung meninjau lokasi peresmian. Setelah meninjau Gerbang Tol Natar, Basuki melanjutkan peninjauan hingga Gerbang Tol Terbanggi Besar di Kabupaten Lampung Tengah. | | |

INFRASTRUKTUR

Menteri PUPR Jajal Tol Sebelum Diresmikan

KALIANDA, KOMPAS — Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono meninjau Tol Bakauheni-Terbanggi Besar, Lampung, Kamis (7/3/2019). Hal itu untuk memastikan kesiapan tol yang akan diresmikan Presiden Joko Widodo, Jumat (8/3).

Tiba di Gerbang Tol Natar sekitar pukul 15.30, Basuki langsung meninjau lokasi peresmian. Setelah meninjau Gerbang Tol Natar, Basuki melanjutkan peninjauan hingga Gerbang Tol Terbanggi Besar di Kabupaten Lampung Tengah.

Basuki ingin tahu waktu yang dibutuhkan untuk berkendara dari Gerbang Tol Natar hingga Terbanggi Besar yang berjarak 45 kilometer. Ternyata, waktu tempuh sekitar 30 menit.

Menteri melanjutkan peninjauan ruas Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang yang masih dikerjakan. Ujung akhir peninjauan di Kilometer 175, Kabupaten Tulang Bawang.

Basuki optimistis, pengoperasian Tol Bakauheni-Terbanggi Besar sepanjang 140,9 km akan berdampak positif pada perekonomian Sumatera. Akses logistik akan lebih baik.

Tol Bakauheni-Terbanggi Besar merupakan bagian dari Tol Trans-Sumatera sepanjang 2.704 km. Tol Bakauheni-Terbanggi Besar menghubungkan dua kota, Bandar Lampung dan Metro, serta tiga kabupaten, Lampung Selatan, Pesawaran, dan Lampung Tengah.

Saat ini, kata Basuki, pemerintah tengah mengkaji penetapan tarif tol. Setelah diresmikan, tol akan digratiskan untuk sementara waktu. Selanjutnya, pemerintah akan menetapkan tarif tol Rp 1.000 per kilometer. Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang ditargetkan dapat beroperasi pada Juni 2019.

Direktur Utama PT Hutama Karya Bintang Perbowo mengatakan, jika sudah beroperasi seluruhnya, waktu tempuh Lampung-Sumatera Selatan bisa lebih cepat. "Waktu tempuh Lampung ke Palembang (Sumsel) tidak sampai lima jam lewat tol," kata Bintang. (VIO)